

LAPORAN
KULIAH KERJA LAPANGAN
DI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA



Oleh :

Reza Rejeki Hasugian

15.852.0019

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

LAPORAN
KULIAH KERJA LAPANGAN
DI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA



Oleh :

Reza Rejeki Hasugian

15.852.0019

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

Daftar Isi	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Pelaksanaan KKL.....	1
b. Tujuan Pelaksanaan KKL.....	2
c. Alasan Pemilihan KKL.....	3

BAB II KAJIAN TEORI

a. Organisasi.....	4
b. Pengertian Organisasi Menurut Para Ahli.....	4
c. Pengertian BNN.....	5
d. Tujuan BNN.....	6
e. Fungsi BNN.....	8
f. Bidang Pencegahan.....	8
g. Tujuan Bidang Pencegahan.....	10
h. Sasaran.....	10

BAB III DESKRIPSI LOKASI KKL

a. Sejarah Singkat.....	11
b. Struktur Organisasi.....	15

BAB IV PEMBAHASAN

a. Jenis kegiatan KKL.....	17
b. Kegiatan Selama KKL.....	24
c. Analisis pelaksanaan KKL.....	26

BAB V PENUTUP

a. Simpulan.....	27
b. Saran.....	27
c. Daftar Pustaka.....	28

LEMBARAN PENGESAHAN

Judul KKL : Laporan dan Pengesahan Data
Nama : Reza Rejeki Hasugian
NPM : 15.852.0019
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Mengesahkan

Medan, 12 September 2018

Mahasiswa Pelaksana KKL


(Reza Rejeki Hasugian)

Dosen Pembimbing Lapangan


(Dra. Hj. Rosmala Dewi, M.Pd)

Wakil Dekan Akademik

(Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP)

Ketua Prodi Administrasi Publik


(Dra. Hj. Rosmala Dewi, M.Pd)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahNya. Dengan rahmatNya pula penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan laporan KKL. Dengan adanya kegiatan KKL ini, mahasiswa diharapkan akan mampu meningkatkan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, serta keterampilan yang mungkin tidak diperoleh dari pendidikan formal di kampus. Karen kegiatan KKL ini merupakan salah satu bentuk penerapan teori yang telah mahasiswa dapatkan dari kegiatan perkuliahan ke dalam praktik kehidupan di dunia kerja yang sebenarnya. Selain itu, mahasiswa dapat mengetahui, memahami serta menganalisis gejala-gejala atau fenomena yang terjadi secara langsung di dalam dunia kerja yang berkaitan dengan Administrasi Publik pada khususnya.

Di dalam kegiatan KKL ini, mahasiswa juga dipancing untuk dapat mengembangkan pola pikir yang kreatif, penuh inisiatif, bertanggung jawab, dan juga tanggap atas segala permasalahan yang ada. Sehingga kegiatan KKL ini dapat dijadikan sebagai bekal mahasiswa, dan merupakan pijakan awal bagi mahasiswa untuk selanjutnya melangkah lebih jauh lagi ke dalam dunia kerja yang nyata. Esensi yang ingin dituangkan di sini adalah bagaimana menyiapkan mahasiswa sedini mungkin dengan berbagai pengetahuan serta kemampuan dalam rangkan mewujudkan mahasiswa yang kompeten, baik dari sisi *brain*, *skill*, maupun *behavior*.

Penulis menyadari bahwa laporan KKL ini masih jauh dari kata sempurna. Terlebih jika tanpa bantuan, bimbingan, serta doa dan semangat dari semua pihak turut mewarnai di dalam proses penyusunan laporan ini. Penulis hanya mampu mengucapkan terima kasih atas semua yang telah diberikan kepada penulis. Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai pembelajaran bagi penulis kedepannya.

Medan, 12 September 2018

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN KKL

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Universitas Medan Area merupakan agenda bagi para mahasiswa tingkat di semester VI Dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa yang nantinya akan memasuki dunia kerja maka Universitas Medan Area sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tingkat tinggi berusaha meningkatkan kualitas mahasiswanya.

Khususnya Fakultas ISIPOL dengan jurusan Administrasi Publik sangat mendorong mahasiswanya untuk meningkatkan kualitas pengetahuannya melalui KKL atau magang yaitu sebagai wadah mahasiswa untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktek. Selain dari itu magang sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena selain mempraktekan teori yang telah diperoleh mahasiswa juga bertambah pengetahuan khususnya dalam menyelenggarakan tugas suatu instansi yang berkaitan dengan ilmu Administrasi Publik.

Mahasiswa dapat mengamati secara langsung kegiatan atau tugas dari pegawai instansi pemerintah, dari situ Mahasiswa akan mengetahui secara garis besar bagaimana gambaran dunia kerja sebenarnya sehingga nantinya Mahasiswa dapat mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan sebelum terjun ke dalam dunia kerja yang sebenarnya. Mahasiswa dapat meningkatkan kompetensi, tidak hanya dalam hal keilmuan, tetapi juga dalam hal kemampuan.

Dalam kegiatan magang kali ini penulis memilih lokasi di BNN Kota Medan, karena ingin mengetahui tata cara dalam mempersiapkan pemberantasan Narkoba dan mencegah Narkoba yang telah disusun dalam program BNN Kota Medan.

3. TUJUAN PELAKSANAAN KKL

1. Mendapatkan pengalaman kerja yang relevan sekaligus media adaptasi/pengenalan terhadap lingkungan kerja sebelum terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya.
2. Mengetahui dan mempelajari tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia kerja, dan kemudian berusaha mencari penyelesaiannya berdasarkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.
3. Mempersiapkan dan melatih profesionalisme di bidang Administrasi Publik yang merupakan disiplin ilmu yang menjadi ujung tombak pemerintahan di dalam pelayanan masyarakat.
4. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan serta ketrampilan, praktis dan sistematis dalam mempersiapkan calon sarjana Ilmu Administrasi Negara.
5. Membina hubungan antara perguruan tinggi dengan berbagai instansi, lembaga pemerintah dan swasta untuk bersama-sama mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Mendapatkan masukan guna umpan balik dalam usaha penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dunia industry dan masyarakat.

C. ALASAN PEMILIHAN LOKASI KKL

Penulis memilih lokasi di Kantor BNN Kota Medan, karena ingin mengetahui tata cara dalam pemberantasan narkotika dan cara pencegahan narkotika buat masyarakat Kota Medan. Selain dari itu penulis juga ingin mengetahui sistem kepemimpinan dan manajemen kepegawaian BNN Kota Medan untuk mencapai keefektifan dan produktivitas kerja.

BAB II

KAJIAN TEORI

Pengertian organisasi

Organisasi adalah suatu pola hubungan yang saling terjalin secara simultan yang menjadi jalan bagi orang, dengan pengarahan dari manajer untuk mencapai sasaran bersama (James A.F Stoner 1996 : 6).

3. Pengertian Organisasi menurut para ahli

- Organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, sebagai suatu kesatuan yang memiliki tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan (Dr. Hj. Erni Rernawan, S.E, M.M 2011:15).
- Organisasi merupakan sebagai proses penentuan dan pengelompokkan pekerjaan yang akan dikerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan (Drs. H. Malayu, S.P. Hasibuan 2005:24).
- Organisasi merupakan suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu (Drs. Malayu S.P.Hasibuan 2005:24).
- Organisasi adalah sebagai fungsi manajemen yang memberikan kemungkinan bagi manajemen dapat bergerak dalam batas-batas tertentu (Drs. Soekarno.K 2006:22)

C. Pengertian BNN

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

D. Tujuan BNN

Tujuan BNN yang utama ialah :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika.

7. Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

E.Fungsi BNN

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.

10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.

19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
21. Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

F. Bidang Pencegahan

Deputi bidang pencegahan adalah unsure pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pencegahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN. Deputi bidang pencegahan dipimpin oleh deputi. Deputi bidang pencegahan terdiri dari atas :

a. Direktorat Desiminasi Informasi

b. Direktorat Advokasi

Pencegahan penyalahgunaan Narkoba adalah seluruh usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba.

Pencegahan Primer

a. Pencegahan Primer adalah :

- Ditujukan pada anak-anak dan generasi muda yang belum pernah menyalahgunakan narkoba.

- Semua sector masyarakat yang berpotensi membantu generasi muda untuk tidak menyalahgunakan narkoba.

b.Kegiatan

Kegiatan Pencegahan Primer terutama dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, penerangan, dan pendidikan.

Pencegahan Sekunder

a.Pencegahan sekunder adalah yang ditujukan pada :

- 1.Anak-anak atau generasi muda yg sudah mulai mencoba-coba menyalahgunakan narkoba.
- 2.Sektor-sektor masyarakat yg dapat membantu anak-anak, generasi muda berhenti menyalahgunakan narkoba.

b.Kegiatan

Kegiatan pencegahan sekunder menitikberatkan pd kegiatan deteksi secara dini terhadap anak yg menyalahgunakan narkoba, konseling perorangan dan keluarga pengguna, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah.

Pencegahan Tertier

a.Pencegahan Tertier adalah yang ditujukan pada :

- 1.Korban Narkoba atau bekas korban narkoba.

2. Sektor-sektor masyarakat yg bisa membantu bekas korban Narkoba utk tidak menggunakan Narkoba lagi.

b. Kegiatan

Kegiatan pencegahan tertier dilaksanakan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap yg bersangkutan dan keluarga serta kelompok sebayanya, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yg menguntungkan bekas korban utk mantapnya kesembuhan, pengembangan minat, bakat dan keterampilan kerja, pembinaan org tua, keluarga, teman dmn korban tinggal, agar siap menerima bekas korban dgn baik jgn sampai bekas korban kembali menyalahgunakan Narkoba.

G. Tujuan Bidang Pencegahan

Bidang Pencegahan bertujuan untuk Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sehingga masyarakat tidak terkena dampak bahayanya Narkoba.

H. Sasaran

Sasaran Bidang Pencegahan adalah masyarakat umum dan seluruh segmentasi yang terdapat dalam masyarakat.

BAB III

DESKRIPSI LOKAS KKL

SEJARAH SINGKAT BNN

Sejarah penanggulangan bahaya narkoba dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung dan lain-lain, yang berada dibawah komando dan bertanggungjawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari APBN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan masyarakat Indonesia tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan

Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengkoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka

BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang dimana BNNBNP-BN Kab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke provinsi dan kabupaten/kota. Diprovinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu

Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerjasama.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara merupakan suatu Badan Vertikal non Kementerian yang terbentuk pada tanggal 19 April 2011 yang dijabat oleh Aguswan, SH dan periode Maret 2013 dijabat oleh Kombes Pol Rudy Tranggono, S.st, MK dan untuk tahun 2015 BNN Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi Drs. Andi Loedianto yang membawahi 33 kabupaten/kota. Sedangkan BNN Kabupaten/Kota untuk Sumatera Utara berdiri sebanyak 12 (dua belas) yaitu Kab. Deli Serdang, Kab. Langkat, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Mandailing Natal, Kab. Asahan, Kota Pematang Siantar, Kab. Karo, Kota Binjai, Kota Tanjung Balai, Kota Gunung Sitoli dan BNN Kota Tebing Tinggi.

- **VISI BNNP SUMATERA UTARA**

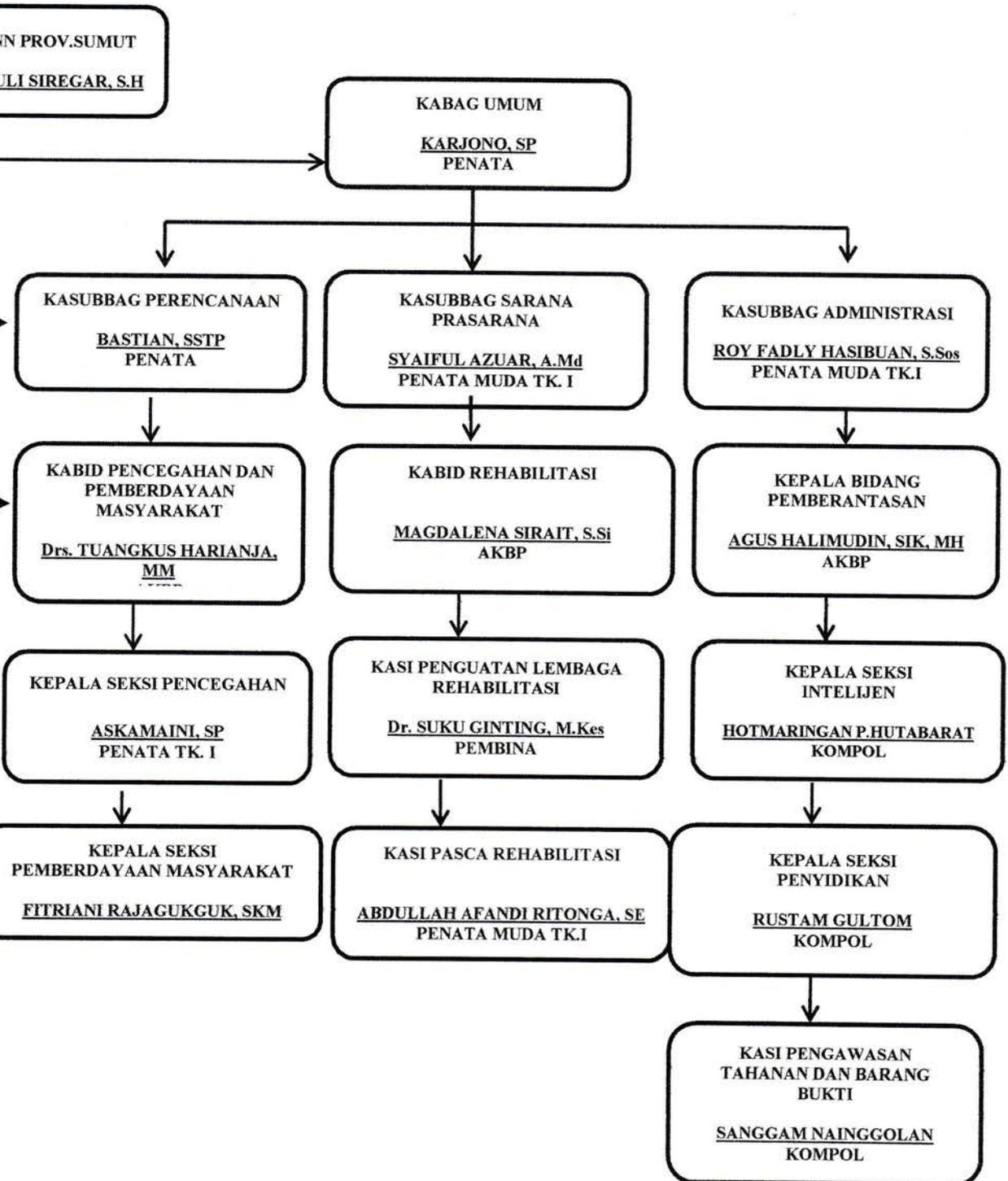
Menjadi lembaga non kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Aktif lainnya.

- **MISI BNNP SUMATERA UTARA**

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan aktif lainnya (narkoba).
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada

B. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI BNN PROVINSI SUMATERA UTARA



B. Tugas Pokok dan Fungsi pada Seksi Cegah

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan.
2. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pencegahan.
3. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan p4gn di bidang pencegahan.
4. Pembinaan teknis p4gn di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pencegahan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. JENIS KEGIATAN KKL

1. Sosialisasi

Pengertian sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu.

Disamping itu, menurut Soerjono Soekanto sosialisasi adalah proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitarnya.

1.1 Tujuan Sosialisasi

Secara umum sosialisasi memiliki fungsi untuk penunjang pencegahan narkotika ke masyarakat dan membuat kesadaran masyarakat akan dampaknya narkotika.

- Memberikan keterampilan kepada seseorang untuk dapat hidup bermasyarakat. Dengan memberikan sosialisasi kepada individu, maka individu tersebut pada akhirnya dapat dengan mudah belajar untuk bersosialisasi pada masyarakat, sehingga individu tersebut dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat.
- Mengembangkan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi secara efektif. Dengan sosialisasi, individu dapat dengan terbiasa untuk berkomunikasi dengan dunia luar dan masyarakat.

- Mengembangkan fungsi-fungsi organik seseorang melalui introspeksi yang tepat. Dengan bersosialisasi, fungsi organik dalam tubuh/jiwa seseorang akan dapat terlatih dengan baik, sehingga individu tersebut dapat dengan mudah untuk berkumpul pada masyarakat. Serta, dengan komunikasi yang baik, maka individu tersebut dapat dengan mudah untuk hidup berdampingan di masyarakat.
- Menanamkan nilai-nilai dan kepercayaan kepada seseorang yang mempunyai tugas pokok dalam masyarakat. Dengan sosialisasi, individu dapat dengan mudah untuk mendapatkan kepercayaan diri karena mereka memiliki komunikasi yang baik di masyarakat. Dengan adanya kepercayaan dan komunikasi tersebut maka individu dapat dengan mudah untuk bersosialisasi pada masyarakat.

1.2 Pola Sosialisasi

Sosialisasi dapat dibagi menjadi dua pola: sosialisasi represif dan sosialisasi partisipatoris. Sosialisasi represif (*repressive socialization*) menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Ciri lain dari sosialisasi represif adalah penekanan pada penggunaan materi dalam hukuman dan imbalan. Penekanan pada kepatuhan anak dan orang tua. Penekanan pada komunikasi yang bersifat satu arah, nonverbal dan berisi perintah, penekanan sosialisasi terletak pada orang tua dan keinginan orang tua, dan peran keluarga sebagai *significant other*. Sosialisasi partisipatoris (*participatory socialization*) merupakan pola di mana anak diberi imbalan ketika berperilaku baik. Selain itu, hukuman dan imbalan bersifat simbolik. Dalam proses sosialisasi ini anak diberi kebebasan. Penekanan diletakkan pada interaksi dan komunikasi bersifat lisan yang menjadi pusat sosialisasi adalah anak dan keperluan anak. Keluarga menjadi *generalized other*.

1.3 Proses Sosialisasi

George Herbert Mead berpendapat bahwa sosialisasi yang dilalui seseorang dapat dibedakan melalui tahap-tahap sebagai berikut.

- **Tahap persiapan (*Preparatory Stage*)**

Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini juga anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna.

Contoh: Kata "makan" yang diajarkan ibu kepada anaknya yang masih balita diucapkan "mam". Makna kata tersebut juga belum dipahami tepat oleh anak. Lama-kelamaan anak memahami secara tepat makna kata makan tersebut dengan kenyataan yang dialaminya.

- **Tahap meniru (*Play Stage*)**

Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada tahap ini mulai terbentuk kesadaran tentang nama diri dan siapa nama orang tuanya, kakaknya, dan sebagainya. Anak mulai menyadari tentang apa yang dilakukan seorang ibu dan apa yang diharapkan seorang ibu dari anak. Dengan kata lain, kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain juga mulai terbentuk pada tahap ini. Kesadaran bahwa dunia sosial manusia berisikan banyak orang telah mulai terbentuk. Sebagian dari orang tersebut merupakan orang-orang yang dianggap penting bagi pembentukan dan bertahannya diri, yakni dari mana anak menyerap normadan nilai. Bagi seorang anak, orang-orang ini disebut orang-orang yang amat berarti (*Significant other*)

- **Tahap siap bertindak (*Game Stage*)**

Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri

pada posisi orang lain pun meningkat sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. Dia mulai menyadari adanya tuntutan untuk membela keluarganya bekerja sama dengan teman-temannya. Pada tahap ini lawan berinteraksi semakin banyak dan hubungannya semakin kompleks. Individu mulai berhubungan dengan teman-teman sebaya di luar rumah. Peraturan-peraturan yang berlaku di luar keluarganya secara bertahap juga mulai dipahami. Bersamaan dengan itu, anak mulai menyadari bahwa ada norma tertentu yang berlaku di luar keluarganya.

- **Tahap penerimaan norma kolektif (*Generalized Stage/Generalized other*)**

Pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, ia dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya tetapi juga dengan masyarakat luas. Manusia dewasa menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama—bahkan dengan orang lain yang tidak dikenalnya—secara mantap. Manusia dengan perkembangan diri pada tahap ini telah menjadi warga masyarakat dalam arti sepenuhnya.

1.4 Agen Sosialisasi

- Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Ada empat agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa, dan lembaga pendidikan sekolah.
- Pesan-pesan yang disampaikan agen sosialisasi berlainan dan tidak selamanya sejalan satu sama lain. Apa yang diajarkan keluarga mungkin saja berbeda dan bisa jadi bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agen sosialisasi lain. Misalnya, di sekolah anak-anak diajarkan untuk tidak merokok, meminum minuman keras dan menggunakan obat-obatan terlarang (narkoba), tetapi mereka dengan leluasa mempelajarinya dari teman-teman sebaya atau media massa.

- Proses sosialisasi akan berjalan lancar apabila pesan-pesan yang disampaikan oleh agen-agen sosialisasi itu tidak bertentangan atau selayaknya saling mendukung satu sama lain. Akan tetapi, di masyarakat, sosialisasi dijalani oleh individu dalam situasi konflik pribadi karena dikacaukan oleh agen sosialisasi yang berlainan.

2. Arsip

Pengertian arsip secara etimologis berasal dari bahasa Belanda yaitu “archieff atau archives”, yang berarti permulaan. Dari kata “arche” inilah kemudian berkembang menjadi kata “ta archia” yang berarti catatan. Kemudian untuk selanjutnya dari kata “ta archia” tersebut berkembang lagi menjadi kata “archeon” yang berarti gedung pemerintahan. Istilah lain dari arsip yaitu file dan record atau warkat.

2.1 Komponen Arsip

Menurut Kennedy dan Schauder 1998 (dalam Sukoco, 2007:82) menjelaskan bahwa setiap dokumen dan arsip terdiri dari :

- Isi yaitu informasi yang terdapat pada arsip berupa idea tau konsep, fakta tentang suatu kejadian, orang, organisasi maupun aktivitas lain yang direkam dalam arsip tersebut.
- Struktur merupakan atribut fisik yang terdiri dari ukuran dan gaya huruf, spasi, margin serta lambing organisasi dan logis yaitu logika dibalik pembuatan dokumen dari suatu arsip tersebut.
- Konteks menjelaskan “mengapa” dari suatu arsip.

2.2 Fungsi Arsip

Secara umum arsip memiliki fungsi untuk menunjang aktifitas administrasi, alat pengambil keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi, dan wahana komunikasi, selain itu memiliki fungsi primer dan sekunder.

- Proses sosialisasi akan berjalan lancar apabila pesan-pesan yang disampaikan oleh agen-agen sosialisasi itu tidak bertentangan atau selayaknya saling mendukung satu sama lain. Akan tetapi, di masyarakat, sosialisasi dijalani oleh individu dalam situasi konflik pribadi karena dikacaukan oleh agen sosialisasi yang berlainan.

2. Arsip

Pengertian arsip secara etimologis berasal dari bahasa Belanda yaitu “archieff atau archives”, yang berarti permulaan. Dari kata “arche” inilah kemudian berkembang menjadi kata “ta archia” yang berarti catatan. Kemudian untuk selanjutnya dari kata “ta archia” tersebut berkembang lagi menjadi kata “archeon” yang berarti gedung pemerintahan. Istilah lain dari arsip yaitu file dan record atau warkat.

2.1 Komponen Arsip

Menurut Kennedy dan Schauder 1998 (dalam Sukoco, 2007:82) menjelaskan bahwa setiap dokumen dan arsip terdiri dari :

- Isi yaitu informasi yang terdapat pada arsip berupa idea tau konsep, fakta tentang suatu kejadian, orang, organisasi maupun aktivitas lain yang direkam dalam arsip tersebut.
- Struktur merupakan atribut fisik yang terdiri dari ukuran dan gaya huruf, spasi, margin serta lambing organisasi dan logis yaitu logika dibalik pembuatan dokumen dari suatu arsip tersebut.
- Konteks menjelaskan “mengapa” dari suatu arsip.

2.2 Fungsi Arsip

Secara umum arsip memiliki fungsi untuk penunjang aktifitas administrasi, alat pengambil keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi, dan wahana komunikasi, selain itu memiliki fungsi primer dan sekunder.

- Fungsi Primer adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kepentingan pencipta arsip tersebut sebagai penunjang saat tugas sedang berlangsung maupun setelah kegiatan selesai, baik itu oleh lembaga/instansi pemerintah, swasta, maupun perorangan. Nilai gunanya meliputi administrasi, hukum, keuangan, ilmiah maupun teknologi.
- Fungsi Sekunder adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan bukan untuk pencipta arsip melainkan bagi kepentingan lembaga/instansi pemerintah, swasta, perorangan dan juga kepentingan umum lain sebagai bahan bukti dan bahan pertanggungjawaban. Nilai gunanya meliputi nilai guna pembuktian dan penginformasian.

2.3 Sifat dan Karakter arsip

Arsip memiliki sifat dan karakter untuk membedakan kualitas arsi, antara lain :

- Autentik, yaitu informasi melekat pada wujud aslinya seperti informasi mengenai waktu dan tempat arsip dibuat/diterima, memiliki tujuan dan kegiatan, bukti kebijaksanaan dan organisasi penciptanya.
- Legal, yaitu dokumentasi untuk mendukung tugas dan kegiatan, memiliki status sebagai bahan bukti resmi bagi keputusan dan pelaksanaan kegiatan.
- Terpercaya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti sah sebagai bahan pendukung pelaksanaan kegiatan.

2.4 Peran arsip

Menurut Wursanto (1991:5) arsip memiliki peranan yang potensial dalam administrasi yaitu sebagai pusat daya ingat, sebagai sumber informasi, sebagai alat

pengawasan, sebagai pembuatan keputusan. Arsip mempunyai peranan yang penting dalam proses penyajian informasi kepada pimpinan yang digunakan dalam proses pembuatan keputusan dan juga perumusan kebijakan.

2.5 Tujuan pengelolaan Arsip

- Memelihara arsip dengan baik.
- Menyimpan warkat dengan sistem yang tepat, sehingga mudah ditemukan kembali secara cepat dan tepat pula.
- Menyediakan tempat penyimpanan yang menandai.
- Menjamin keselamatan warkat baik isinya maupun bentuknya.
- Memberikan pelayanan peminjaman warkat dengan baik.

A.Kegiatan Selama KKL

- Hari pertama, saya pembagian tempat dan mengikuti rapat tentang integritas pembangunan berwawasan anti narkoba di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Medan
- Hari kedua, saya mengedit laporan data-data yang ada di seksi cegah
- Hari ketiga, saya mengikuti senam pagi dan mengisi surat masuk dan membuat arsip surat di BNN
- Hari keempat, saya apel pagi dan menyusun berkas-berkas di seksi cegah dan mengisi surat masuk-keluar dari BNNK
- Hari ke lima, saya membuat arsip surat di subbagian Cegah
- Hari ke enam, saya mengikuti apel pagi dan menyusun berkas yang sudah di scan ke Map pegawai
- Hari ke tujuh, saya mengikuti kelapangan dalam melakukan survey pemasangan baliho BNNP SUMUT di Lubuk Pakam bersama ibu Askamaini, SP.
- Hari ke delapan, saya mengikuti senam pagi dan menyusun berkas dan membantu pegawai BNN dalam pengarsipan data.
- Hari ke Sembilan, saya mengikuti sosialisasi ke Sekolah SMK Negeri Percut Sei Tuan bersama Bapak Ahmad Surya dan Bapak Amzai Marpaung, S.pdi
- Hari ke sepuluh, saya mengikuti senam pagi dan menyusun berkas-berkas dan mengisi surat masuk-keluar di subbagian cegah
- Hari ke sebelas, saya izin sakit
- Hari ke dua belas, saya mengikuti apel pagi dan mengisi surat masuk-keluar di subbagian Cegah dan mengantar surat ke bagian administrasi

- Hari ke tiga belas, saya membuat pengarsipan data yang sudah di scan ke map dokumen kerja pegawai
- Hari ke empat belas, saya mengikuti Upacara HUT RI Ke 73 di BNNP SUMUT
- Hari ke lima belas, saya mengikuti kegiatan sosialisasi di acara car free day di Lapangan Merdeka Walk
- Hari ke enam belas, saya mengikuti apel pagi dan mengisi surat menyurat dan mengedit laporan data yang ada dalam subbagian cegah
- Hari ke tujuh belas, saya melanjutkan mengedit laporan data-data dalam subbagian cegah
- Hari ke delapan belas, saya mengikuti apel pagi dan membantu pegawai untuk mengantarkan surat ke Bank SUMUT
- Hari ke Sembilan belas, saya menulis surat masuk-keluar subbagian cegah
- Hari ke dua puluh, saya mengikuti apel pagi dan diskusi dengan kepala seksi pemberdayaan masyarakat tentang narkoba
- Hari ke dua puluh satu, saya mengikuti apel pagi dan mengisi surat masuk-keluar dan mengikuti kegiatan barang bukti narkoba di BNNP SUMUT dengan ibu Lisa Fitria, SE
- Hari ke dua puluh dua, saya mengisi surat keluar-masuk subbagian cegah
- Hari ke dua puluh tiga, saya mengikuti apel pagi dan melakukan bimbingan laporan KKL dengan ibu Askamaini, SP
- Hari ke dua puluh empat, saya menyusun arsip surat menyurat
- Hari ke dua puluh lima, saya
- mengikut senam pagi dan menyiapkan laporan KKL

B. Analisis Pelaksanaan Kegiatan

Pengarsipan surat masuk-keluar guna untuk mengetahui sistem penyuratan yang benar. Dan saya mengetahui sistem pencegahan narkoba dengan mengikuti kegiatan sosialisasi dan mengetahui sistem rapat di Lingkungan Pemerintahan Kota Medan, dan saya mengetahui sistem pengerjaan di instansi. Hari pertama KKL pada bulan Agustus sudah mulai aktif mengikutin kegiatan di instansi BNNP SUMUT. Saya juga melihat pihak BNNP SUMUT kerja keras untuk mengenai pencegahan narkoba dan transparan dalam memberikan data, serta memberikan bimbingan dan penjelasan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A.KESIMPULAN

Saya melakukan kegiatan magang pada organisasi pemerintahan yaitu BNNP SUMUT. Kegiatan KKL dilakukan selama satu bulan. Di dalam kegiatan KKL ini, saya mendapatkan banyak pengalaman, pengetahuan, serta hal-hal baru yang sangat bermanfaat. Dari kegiatan ini pula saya dapat mengenal praktik administrasi pada organisasi pemerintahan terutama pada memperkenalkan program sosialisasi anti narkoba, serta perencanaan dari situ saya dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari perkuliahan dan mencoba menemukan sesuatu yang baru yang belum diketahui dari pendidikan formal.

Dalam kegiatan KKL ini, saya dapat mengetahui secara langsung bagaimana kegiatan yang dilakukan BNNP SUMUT. Selama KKL tidak ditemukan permasalahan yang terjadi terlihat dari kerajinan serta kedisiplinan para pegawai terlihat baik, ini dilihat dari daftar absen pegawai yang hadir pagi mengikuti apel pagi harian, jarang terlihat para pegawai telat datang untuk bekerja. Banyak manfaat yang saya dapatkan, dan saya bagikan pengetahuan yang saya dapat selama KKL dalam laporan ini, yang selanjutnya dapat memberikan manfaat bagi orang lain.

B.SARAN

Selama KKL di Kantor BNNP SUMUT saran saya anak KKL lebih di manfaatkan lebih aktif dalam mengikuti sistem pekerjaan di BNNP SUMUT dan meletakkan anak KKL sesuai dengan jurusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rernawan, Erni. 2011. *Organization culture*. Jakarta : Alfabeta
- Hasibuan, Malayu. 2005. *Organisasi dan motivasi dasar peningkatan produktivitas*. Bandung : Bumi Pusaka
- Wursanto, Ig. 2002. *Dasar-dasar ilmu organisasi*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- Sobirin, Achmad. 2007. *Budaya Organisasi*, Jakarta : UUP STIM YKPN
- Sutarto. 2006. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press